

ANALISIS PEMEKARAN DI DESA TAMBAK TINGGI PASCA PEMEKARAN DESA TAMBAK TINGGI KECAMATAN DEPATI VII TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Wulan Sundari¹⁾, Badrizal, S.Sos., M.Si²⁾, Fadlan Kalma, S.ThI., M.H³⁾

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

wulansundari0798@gmail.com

badrizal1971@gmail.com

fadlankalma@gmail.com

ABSTRACT

This study take place in Tambak Tinggi village on Depati VII sub-district with the research problem is how impact of accelerated infrastructure development after village proliferation on Tambak Tinggi village Depati VII sub-district. The aim of this study is to find out the impact of accelerated infrastructure development after village proliferation on Tambak Tinggi village Depati VII sub-district. This study used qualitative research design. Whereas the data collection technique through deep interview. The data were obtained through free field interviews with 10 informants using interview guidelines which were then analyzed data by triangulating data through data reduction, data interpretation and drawing conclusions so that accurate information could be obtained. The results of this research were many road infrastructures have been built and it is still in good condition. This can be seen from environmental roads, farm roads, drainage and retaining walls in the form of concrete and continues to increase every year. 2) In health infrastructure, there are only auxiliary community Health centers and that is inheritance from the main village which is still being used together. 3) In educational infrastructure, there are only elementary schools and this is inheritance from the main village which is still being used together. Islamic kinder garden was founded since the first village head and it is still running well. 4) In the economic infrastructure, there are only stalls and shop houses owned by the community which are widely developed. The village administration has not been able to build village halls and markets because there is no land to be used. Then it was also hard to find about the funding. However, to facilitate economic activity, one of the ways the village government helps the community is by repairing roads so that economic activities run smoothly.

Keywords: Village Proliferation, Infrastructure, Accelerated Development

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII dengan rumusan masalah bagaimanakah dampak percepatan pembangunan infrastruktur pasca pemekaran di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII di Kabupaten Kerinci?. Tujuan penelitian iniyaitu ingin mengetahui dampak percepatan pembangunan infrastruktur pasca pemekaran di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara bebas dilapangan kepada 10 orang informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang kemudian dilakukan analisa data dengan triangulasi melalui reduksi data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Adapun hasil penelitian yakni, 1) Pada prasarana jalan sudah banyak yang dibangun dan masih dalam keadaan baik. Hal ini nampak dari jalan lingkungan, jalan usaha tani, drainase dan tembok penahan dalam bentuk beton dan terus bertambah pada tiap tahunnya. 2) Pada prasarana kesehatan, hanya ada puskesmas pembantu dan itu pun merupakan warisan dari desa induk yang masih dipergunakan bersama-sama. 3) Pada prasarana pendidikan, hanya ada SD dan itu pun merupakan warisan dari desa induk yang masih dipergunakan bersama-sama. Untuk Raudhatul Athfal didirikan

sejak kades pertama dan masih berjalan dengan baik. 4) Pada prasarana ekonomi, hanya ada warung dan ruko milik masyarakat yang banyak berkembang. Dari pemerintahan desa belum bisa membangun balai desa dan pasar karena tidak adanya lahan yang bisa digunakan. Kemudian juga pendanaan yang sulit. Namun untuk memperlancar kegiatan ekonomi, salah satu cara pemerintah desa membantu masyarakatnya adalah dengan memperbaiki jalan sehingga kegiatan ekonomi berjalan lancar.

Kata Kunci : *Percepatan pembangunan, Infrastruktur, Pasca Pemekaran*

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan dapat sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. Salah satu tindakan pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemekaran wilayah.

Menurut Effendy yang dikutip dalam Suryanto (2009:2) menyatakan pemekaran daerah dilakukan pada beberapa daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah, berupa makin pendeknya rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Berdasarkan atas pemahaman dan alasan pemekaran tersebut pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini pemekaran daerah selalu dikaitkan dengan pemekaran provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan saja, namun juga terdapat pemekaran kelurahan/desa yang jumlahnya sangat besar. Data yang dihimpun dari BPS menunjukkan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah desa yang diakibatkan oleh pemekaran desa dan desa baru akibat transmigrasi. Terhitung sejak desember 2007 jumlah desa sebesar 73.405 desa dan meningkat tajam sampai juni 2018 terjadi penambahan jumlah desa menjadi 74.597 desa. Sehingga dalam kurun waktu 11 tahun telah terjadi penambahan desa sebesar 1.192 desa (Wikipedia diakses pada tanggal 30 juni 2020).

Sejak berlakunya undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya peraturan ini mengakibatkan meningkatnya permohonan jumlah desa yang dimekarkan dikarenakan lebih mudahnya syarat untuk melakukan pemekaran desa yakni keputusan pemekaran cukup lewat peraturan daerah (Perda). Meningkatnya jumlah desa baru juga tidak terlepas dari semangat otonomi serta terbitnya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Selanjutnya, menurut peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci nomor 6 tahun 2013 tentang pembentukan desa baru di kecamatan Depati Tujuh, Tambak Tinggi adalah

salah satu desa di kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi yang merupakan hasil pemekaran desa Sekungkung pada tahun 2011. Pemekaran desa Tambak Tinggi merupakan inisiasi oleh para warga masyarakat, pengurus BPD dan perangkat desa Sekungkung yang merupakan desa induk sebelum pemekaran ini menyetujui tentang adanya kebijakan pemekaran desa. Seluruh pemangku kepentingan melakukan hal ini agar pembangunan lebih meningkat dan lebih efisien.

Sebelum pemekaran desa, permasalahan yang sering di hadapi adalah pembangunan di bidang infrastruktur di desa Tambak Tinggi adalah:

1. Terlihat jalan Lingkungan desa masih kurang baik dan banyak berlubang-lubang dan masih dalam bentuk tanah dan kerikil jadi arus transportasi menjadi terhambat.
2. Pembangunan drainase yang belum merata, hal ini nampak dari masihnya aliran limbah rumah tangga yang tergenang disekitaran rumah penduduk.
3. Tempat ibadah cuma ada musholla yang tidak dapat menampung masyarakat, serta tidak adanya tebing penahan sungai sehingga masih sering terjadi banjir.
4. Sarana prasarana pendidikan cuma ada Sekolah Dasar.
6. Kemudian, topografi wilayah yang hampir sebagian adalah persawahan dengan tekstur tanah yang cukup subur, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan peternak. Walaupun dialirin oleh air sungai namun hal itu tidak terlalu dimanfaatkan untuk membantu persawahan masyarakat sehingga tidak memberi manfaat yang signifikan.
7. Gedung puskesmas pembantu di desa sudah ada namun belum dimanfaatkan secara baik.

Dengan adanya pemekaran desa baru dalam rangka mengatur dan mengurus wilayah dan rumah tangganya sendiri. Namun terlepas itu semua inti dari pemekaran desa Tambak Tinggi adalah cara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dari fakta-fakta diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa sejauh mana percepatan pembangunan infrastruktur setelah pemekaran desa Tambak tinggi selama 9 tahun.

1. Tinjauan Pustaka

1.2. Otonomi Daerah

1.2.1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. Pemekaran Wilayah

1.3.1. Pengertian Pemekaran Wilayah

Menurut Makaganza (2008:9) istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (eupieisme) yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia.

1.4. Pemekaran Desa

1.4.1. Pengertian Pemekaran Desa

Menurut Albert (1995:32) menyatakan pemekaran desa adalah suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah baru. Pemekaran desa adalah pembentukan daerah otonom baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemekaran desa juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

1.4.2. Tujuan Pemekaran Desa

Pemekaran desa menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya bertujuan untuk upaya meningkatkan kualitas percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara yang satu dengan yang lain. Hal ini perlu di upayakan agar tidak muncul atau terjadi perbedaan yang mencolok pada masa mendatang.

Pemekaran Desa prinsipnya adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah baik dari segi ekonomi, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban serta pemerataan pembangunan. Pemekaran Desa adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antarwilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan wilayah.

1.4.3. Manfaat Pemekaran Desa

Menurut Maarif dalam Jurnal Silvana Yosephus (2014:4) merumuskan manfaat kebijakan pemekaran wilayah sebagai berikut:

1. Secara Politis adalah untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Secara Formal/Konstitusional adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan di daerah terutama dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Secara Administratif Pemerintahan, adalah untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif

1.4.4. Syarat-Syarat Pemekaran Desa

Menurut Effendy yang dikutip Suryanto (2009:2) desa yang akan dibentuk disyaratkan memenuhi ketentuan (a) jumlah penduduk, (b) luas wilayah, (c) bagian wilayah kerja, (d) perangkat, dan (e) sarana prasarana pemerintahan. Pemekaran daerah dilakukan pada beberapa daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah, berupa makin pendeknya rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.. Berdasarkan atas pemahaman dan alasan pemekaran tersebut pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Pembangunan Desa

1.5.1. Konsep Efektivitas Pembangunan

Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk menciptakan ketetapan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tuntutan kehidupan masing-masing. Siagian dalam Indrawijaya (2010: 75) memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

1.5.2. Konsep Pembangunan

Menurut Sumanto (2012:11) menyatakan pembangunan adalah proses perubahan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk merubah keadaan yang dikehendaki. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik secara material maupun spiritual.

Kemudian, Siagian (2009:4-5) menyatakan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan sebagai suatu pertumbuhan yang merupakan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

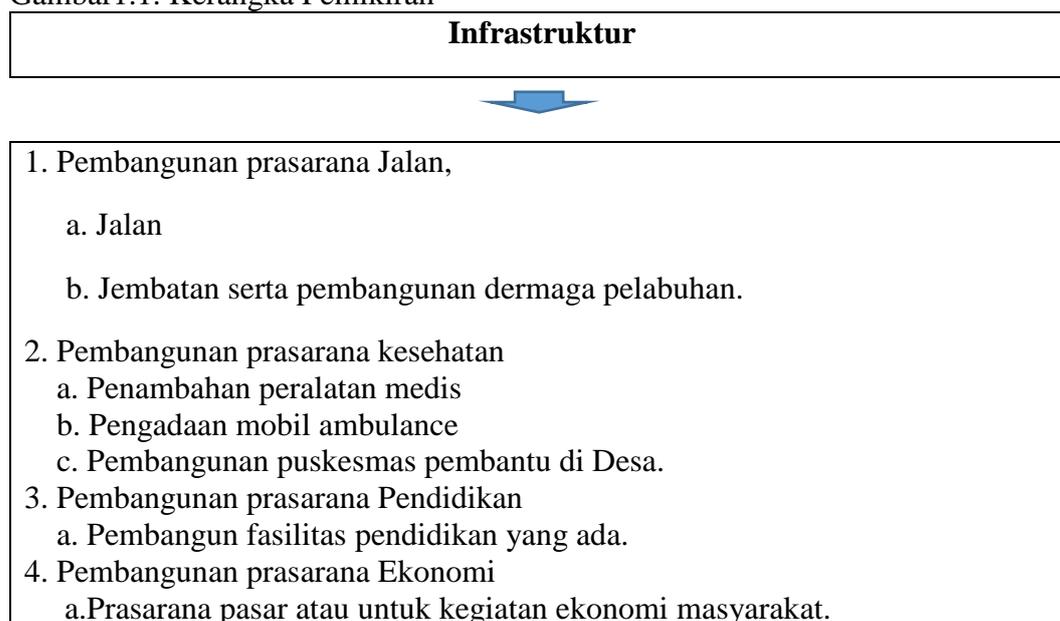
1.6. Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988:12) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie, 2005:56).

1.7. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa percepatan pembangunan infrastruktur di desa Tambak Tinggi pasca pemekaran desa, maka penulis menggunakan teori yang dari (Yonathan, 2014) yang akan dijelaskan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



(Yonathan, 2014)

II. METODE PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

2.2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. (Moleong 2009: 21). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi dan aktivitas sosial.

2.3. Informan Penelitian

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiono, 2003:91). Dalam penelitian Kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Bugin, 2003:53).

2.4. Data Yang Akan diambil

Untuk keperluan penelitian ini, adapun jenis data yang penulis gunakan adalah

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan atau ke tempat penelitian melalui wawancara agar data yang didapatkan tepat dan benar.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip-arsip dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat menunjang penelitian dengan melihat relevansinya dengan permasalahan penelitian.

2.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data, fakta dan informasi di lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*), merupakan teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. (Danim, 2002:130). Wawancara dilakukan berguna agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Wawancara ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh di lapangan nantinya, berdasarkan tingkat kejenuhan yang akan diperoleh melalui wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara serta instrumen lainnya seperti pena, buku, *handphone* atau kamera yang akan dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data di lapangan.

2.6. Unit Analisis

Menurut Hamid (2004:184) Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktifitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok sosial yakni masyarakat Desa Tambak Tinggi.

2.7. Unit Analisis

Menurut Hamid (2004:184) Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktifitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok sosial yakni masyarakat Desa Tambak Tinggi.

2.8. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini tempat yang penulis jadikan lokasi penelitian yaitu desa Tambak Tinggi. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena melihat Desa Tambak Tinggi telah menjadi desa Pemekaran dikarenakan sesuai dengan latar belakang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Untuk melihat definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dari 4 indikator dari Yonatan (2014:534) yang menyatakan infrastruktur dapat termasuk kedalam:

1. Pembangunan prasarana Jalan

Yakni termasuk ke dalam infrastruktur pemeliharaan peningkatan jalan dan jembatan serta pembangunan dermaga pelabuhan.

2. Pembangunan prasarana kesehatan

Yakni termasuk ke dalam infrastruktur penambahan peralatan medis, pengadaan mobil ambulance, pembangunan puskesmas pembantu di Desa.

3. Pembangunan prasarana Pendidikan

Yakni termasuk ke dalam infrastruktur sekolah, diarahkan untuk membangun dan melengkapi fasilitas pendidikan yang ada.

4. Pembangunan prasarana Ekonomi

Yakni termasuk ke dalam infrastruktur jalan, jembatan, prasarana pasar atau untuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan teori diatas, indikator infrastruktur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari teori Yonatan (2014). Indikator ini dipakai karena dalam teori ini dilihat sesuai untuk daerah pedesaan dan kondisi yang ada dilapangan.

3.2. Karakteristik Informan

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan. Peneliti menggunakan purposive sampling yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di desa Tambak Tinggi.

3.3. Temuan dan Hasil Penelitian

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah di peroleh dari beberapa informan yang telah di pilih selama penelitian berlangsung. Selain itu, juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Analisis data ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Adapun dari penelitian yang telah di lakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan adanya pembangunan infrastruktur di desa Sekungkung yang dapat dilihat dari hasil wawancara ini berdasarkan indikator penelitian.

IV. SIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan yaitu, berdasarkan empat indikator oleh Yonanta, indikator penelitian yang diujikan tentang analisis pembangunan infrastruktur pasca pemekaran desa Tambak Tinggi kecamatan Depati VII kabupaten Kerinci, yaitu:

1. Pada prasarana jalan sudah banyak yang dibangun dan masih dalam keadaan baik. Hal ini nampak dari jalan lingkungan, jalan usaha tani, drainase dan tembok penahan dalam bentuk beton. Hal ini juga dapat direalisasikan karena pertama kalau ada jalan yang rusak pemerintah desa segera memperbaiki jalan tersebut, yang kedua adanya

kesadaran masyarakat untuk membersihkan drainase yang berada didepan rumah dan ikut berpartisipasi dalam gotong royong massal.

2. Pada prasarana kesehatan, hanya ada puskesmas pembantu dan itu pun merupakan warisan dari desa induk yang masih dipergunakan bersama-sama. Tidak adanya pembangunan infrastruktur baru karena pertama adanya kendala dalam pendaan seperti pengadaan ambulans bersama, kemudian karena fasilitas itu juga masih dalam kondisi baik sehingga masih layak pakai.
3. Pada prasarana pendidikan, hanya ada SD dan itu pun merupakan warisan dari desa induk yang masih dipergunakan bersama-sama. Untuk Raudhatul Athfal didirikan sejak kades pertama dan masih berjalan sampai baik. Tidak adanya pembangunan infrastruktur baru dalam bidang pendidikan karena pertama SD dan TK yang ada sekarang masih mampu menampung anak-anak untuk mengenyang pendidikan dan karena fasilitas itu juga masih dalam kondisi baik sehingga masih layak pakai.
4. Pada prasarana ekonomi, hanya ada warung dan ruko milik masyarakat yang banyak berkembang. Dari pemerintahan desa membangun penunjang kegiatan ekonomi seperti perbaikan jalan, pembersihan drainase, pembangunan PAMSIMAS, dan lampu jalan tenaga surya. Untuk pembangunan pasar, terminal, dan balai desa belum bisa dibangun karena tidak adanya lahan yang akan digunakan. Kemudian juga pendanaan yang sulit. Namun untuk memperlancar kegiatan ekonomi, salah satu cara pemerintah desa membantu masyarakatnya adalah dengan memperbaiki jalan sehingga kegiatan ekonomi berjalan lancar.

4.2 Saran

1. Pada prasarana jalan sudah lebih baik, namun demikian pembangunan infrastruktur yang belum terlalu dijamah adalah pembangunan dinding penahan sepanjang aliran sungai masih belum tercapai target. Hal ini nampak karena masih adanya banjir yang melanda warga apabila hujan. Untuk itu perangkat desa atau pemerintahan desa seharusnya dalam mencoba mengatasi hal ini dengan memina bantuan kepada anggota dewan atau kepada kantor PUPR agar bisa membantu merencanakan pembuatan dinding penahan sepanjang aliran sungai yang dananya bisa dari Kabupaten atau pun provinsi.
2. Pada prasarana kesehatan, hanya ada puskesmas pembantu dan itu sudah baik. Walaupun sudah baik alangkah baik ditambah fasilitas kesehatan seperti adanya pengadaan ambulans milik desa sendiri dan adanya pembangunan pos Posyandu tersendiri.
3. Pada prasarana pendidikan, hanya ada SD dan itu pun Masih layak untuk dipakai. Untuk meningkatkan pembangunan pada bidang ini, perangkat desa bisa meminta masyarakat bergotong royong agar fasilitas ini tetap terjaga dengan baik dan lebih layak lagi untuk dipakai.

Pada prasarana ekonomi, hanya ada kegiatan ekonomi rakyat yang berkembang. Pemerintahan desa seharusnya sudah bisa merencanakan adanya balai desa atau membuat balai sendiri yang bisa dilokasikan di lapangan bola atau volley agar ekonomi masyarakat bisa lebih tumbuh lagi.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih pada kesemua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Erwin Ndakularak, dkk. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali* Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Grigg, Neil.1988. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley and Sons
- Hami. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman*. Edisi 2004/2005, BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Albert. 1995. *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)*, Jakarta: Swadaya.
- Huda, A. Faisal Yusni, dkk. *Kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa (studi pada desa sumberbrantas, kota batu)* . Jurnal Nasional Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Konsep, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Irawan, dkk. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- Kodoatie, Robert.2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Laurenzia Karinda. 2015. *Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kinerja Hukum Tua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa)*. Jurnal Nasional Ilmu Pemerintahan.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Nasikun. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT.Tiara Wacana. Yogyakarta
- Prabawa, S. 1998. *Sumber daya Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Studi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat*. Tesis (tidak diterbitkan). Fakultas pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Rambe, Armaini. 2011. *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*. Tesis (tidak diterbitkan). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiono. 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo
- Sjafari, Agus. & Sumaryo GS (ed). 2012. *Pembangunan Masyarakat: Konsep dan Implementasi di Era Otonomi Daerah*. Serang: FISIP Untirta Press.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep dimensi dan strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharto. 2006. *Politik Hukum dalam pengelolaan Keuangan daerah*. Jakarta : Kencana
- STIA – NUSA, 2012, *Buku Panduan STIA – NUSA Sungai Penuh Tahun 2012*.
- Yosephus, Silvana. 2014. *Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pelayanan Publik (suatu Studi di Kantor Kecamatan Tombariri Timur dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga)*. Jurnal Ilmu Politik
- Peraturan Perundangan :**
Undang-Undang No. 6, Tahun 2014, Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 ,Tentang Pemerintahan Daerah.

PERMENDAGRI Nomor 28, Tahun 2006, Tentang Pembentukan, Penghapusan,
Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Peraturan Pemerintah No 78, Tahun 2007, Pemekaran Daerah/Wilayah
Peraturan Daerah No. 11, Tahun 2011, Pembentukan Desa Baru di Kecamatan Depati Tujuh